



# Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung

2019 - 2024



DINAS PERHUBUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
TAHUN 2019

# DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
BAB I PENDAHULUAN	ii
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	12
Sumber Daya Manusia	12
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan, Pelayanan Perangkat Daerah	16
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	17
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	17
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	23
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	26
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	29
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	30
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	31
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	31
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	33
5.1 Strategi	33
5.2 Kebijakan	34
5.3 Analisis Strategi	37
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	38
BAB VII KINERJA PENYELANGGARAAN BIDANG URUSAN	44

## **DAFTAR TABEL DAN GAMBAR**

Tabel 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
Tabel 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan	12
Tabel 3 Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf	12
Tabel 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung 2013-2018	14
Tabel 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung 2013-2018	15
Tabel 6 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung	32
Tabel 7 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	36
Tabel 8 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kota Bandung	41
Tabel 9 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	44
Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandung	10

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis PD (Renstra-PD).

Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap PD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap PD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra PD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Pemerintah Kota Bandung saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Perda No. 08 Tahun 2008) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung

Tahun 2018-2023. Perangkat Daerah melakukan penyusunan Renstra PD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dinas Perhubungan Kota Bandung adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan, diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra tersebut harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah kota yaitu RPJMD Kota Bandung 2018-2023.

Renstra merupakan komitmen Dinas Perhubungan Kota Bandung yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan Kota Bandung serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Bandung, yaitu 'Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis'.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ) Propinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025;
- j. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005 – 2025;

- k. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor \_ Tahun \_ Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung adalah menyusun dokumen arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 tahun mengacu kepada RPJMD tahun 2018 – 2023

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung adalah untuk:

1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai institusi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Bandung;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan;
5. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung 2019-2024 dibuat dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi Perangkat Daerah) dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang



telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, kemudian mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah  
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah, uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (Proses, prosedur, mekanisme).
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah  
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MGD's atau indikator yang telah di ratifikasi oleh pemerintah.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan, Pelayanan Perangkat Daerah  
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (untuk

Kabupaten/Kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta fakto-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian tabel T-B.35

#### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

#### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun factor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

#### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat

Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya.

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

## BAB VII KINERJA PENYELANGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 160 huruf i, Renstra PD disusun memperhatikan Renstra kementerian/lembaga dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan menyelaraskan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap PD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dalam Renstra PD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Visi PD merupakan keadaan yang ingin diwujudkan PD pada akhir periode Renstra PD, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD. Oleh karena itu untuk dapat menggambarkan penyelenggaraan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung dari tahun 2019-2024 yang menjadi dasar dalam perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung, dapat ditinjau dari keberhasilan penyelenggaraan upaya perhubungan sebagai suatu sistem.

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

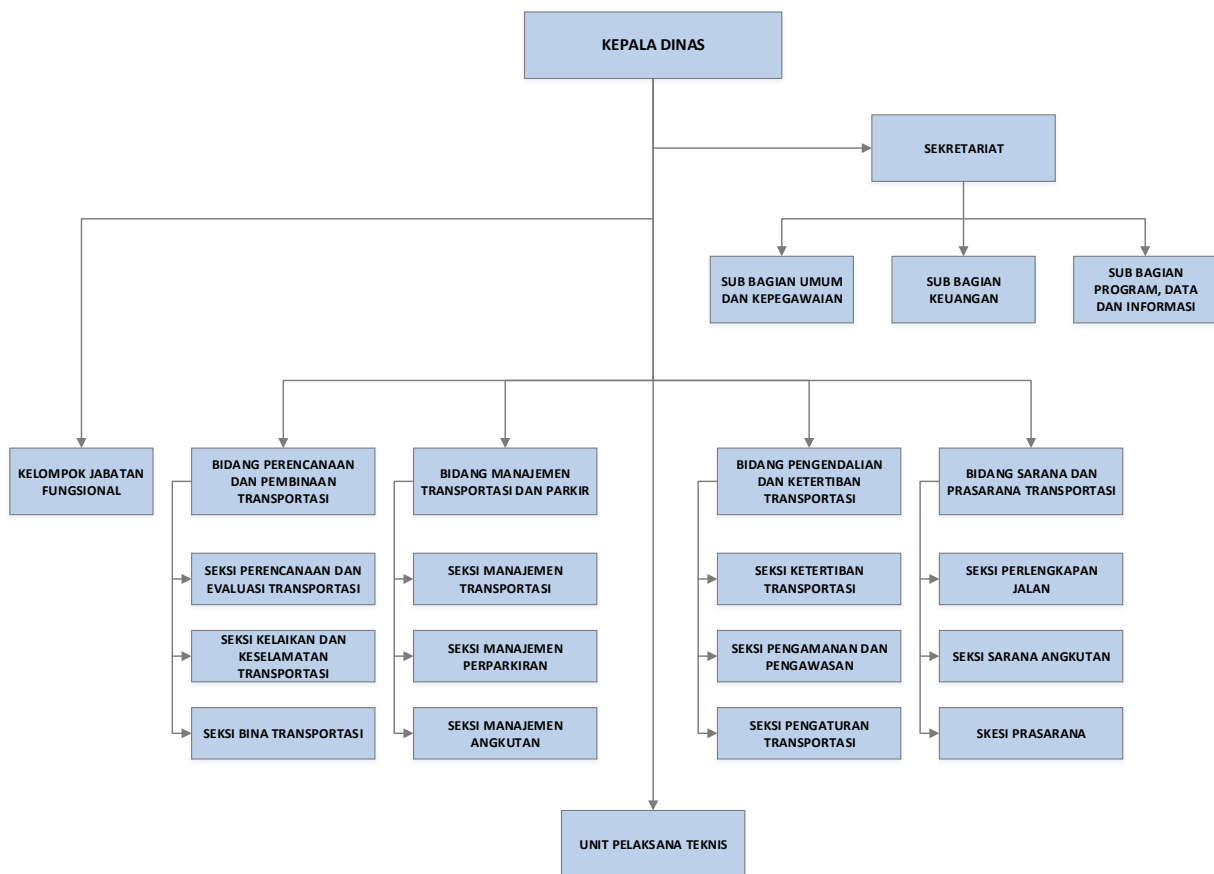
Dinas Perhubungan Kota Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan lingkup Perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan lingkup Perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Perhubungan;
- d. Pelaksanaan administrasi lingkup Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan perangkat organisasi aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung terdiri dari:

*Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandung*



Sumber: Peraturan Walikota Bandung No. 1392 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandung

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Program, Data dan Informasi.
- c. Bidang Perencanaan dan Pembinaan Transportasi, membawahkan:
  1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Transportasi;
  2. Seksi Kelaikan dan Keselamatan Transportasi;
  3. Seksi Bina Transportasi.
- d. Bidang Manajemen Transportasi dan Parkir, membawahkan:
  1. Seksi Manajemen Transportasi;
  2. Seksi manajemen Perparkiran;
  3. Seksi Manajemen Angkutan.
- e. Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi, membawahkan:
  1. Seksi Ketertiban Transportasi;
  2. Seksi Pengamanan dan Pengawasan;
  3. Seksi Pengaturan Transportasi.
- f. Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi, membawahkan:
  1. Seksi Perlengkapan Jalan;
  2. Seksi Sarana Angkutan;
  3. Seksi Prasarana.
- g. UPT;
- h. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Bandung terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti peralatan/ perlengkapan/ asset.

### Sumber Daya Manusia

a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

*Tabel 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan*

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
<b>1</b>	Doktor (S-3)	-
<b>2</b>	Pasca Sarjana (S-2)	17
<b>3</b>	Sarjana (S-1)	98
<b>4</b>	Diploma (D-3)	6
<b>5</b>	Diploma (D-2)	2
<b>6</b>	SLTA	1
<b>7</b>	SLTP	242
<b>8</b>	SD	29
	<b>Jumlah</b>	21

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

*Tabel 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan*

No	Golongan	Jumlah
<b>1</b>	IV	11
<b>2</b>	III	148
<b>3</b>	II	234
<b>4</b>	I	23
	<b>Jumlah</b>	416

c. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

*Tabel 3 Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf*

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
<b>1</b>	Esselon II B (Kepala Dinas)	1
<b>2</b>	Esselon III A (Sekretaris)	1
<b>3</b>	Esselon III B (Kepala Bidang)	4
<b>4</b>	Esselon IV A (Kassubag/Kasie/Ka. UPT)	18
<b>5</b>	Esselon IV B (Kassubag TU UPT)	2
	<b>Jumlah</b>	28

d. Sumber Daya Lainnya

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja pelayanan perhubungan Dinas Perhubungan Kota Bandung merupakan keberhasilan Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam menyelenggarakan pelayanan perhubungan. Untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung disesuaikan dengan sasaran umum pembangunan transportasi Kota Bandung yang telah sejalan dengan sasaran pembangunan transportasi nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2000-2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional / RPJMN pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun \_\_\_\_ pada Peraturan Daerah Nomor \_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_ tentang RPJMD Kota Bandung Tahun \_\_\_\_, dan disesuaikan pula dengan Visi dan Misi Kota Bandung.

Selanjutnya pencapaian kinerja Pelayanan PD Dinas Perhubungan Kota Bandung disesuaikan dengan tugas dan fungsi PD pada Peraturan Walikota Nomor 1392 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandung, dibandingkan dengan target SPM. Pada akhirnya pencapaian kinerja 2013 s/d 2018 mencakup penetapan indikator kinerja disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD serta indikator SPM, maupun capaian kinerja sesuai target SPM, IKK dan target indikator lainnya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis.



(table T-C.23).

Tabel 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung 2013-2018

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase aspek penyebab kemacetan yang teratasi				31%	47%	63%			31.25%	46.88%	53.125%			1.008	0.997	0.850		
	Persentase titik kemacetan yang teratasi							81.25%	100				75%					0.923	
2	Persentase angkutan umum yang laik jalan				95.50%	96%	96.50%	97%	97.50%	95.50%	98.23%	96.50%	96.35%	97.93%	1.000	1.023	1.000	0.993	1.004
3	Rasio pengguna kendaraan pribadi dan pengguna angkutan umum							75:25	74:26				80,5:19,5	73,86 : 26,14				0.78	1.004
4	Persentase aparatur Dinas Perhubungan yang memiliki kompetensi								15%					15.60%					1.040

(table T-C.24).

Tabel 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung 2013-2018

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke					Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	9,620,360,000	13,676,282,900	9,792,301,000	6,286,213,115	3,546,531,015	7,040,550,515	11,887,690,472	7,779,211,445	4,655,961,181	3,158,918,600	0.732	0.869	0.794	0.741	0.891	-16%	-10%
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	2,574,900,000	1,879,634,520	6,429,634,520	5,127,602,391	5,741,584,821	1,598,079,760	1,855,580,801	4,451,100,624	4,697,096,150	5,467,297,500	0.621	0.987	0.692	0.916	0.952	52%	44%
Program peningkatan pelayanan angkutan	46,279,529,542	61,256,958,000	43,002,830,850	44,752,879,950	36,181,988,260	40,315,875,934	40,147,999,779	24,241,092,023	29,488,439,492	23,688,782,342	0.871	0.655	0.564	0.659	0.655	-3%	-10%
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	6,333,050,000	6,776,130,000	15,776,130,000	9,247,873,338	10,319,841,065	5,877,858,080	4,883,903,360	14,922,050,910	7,805,641,366	9,236,673,267	0.928	0.721	0.946	0.844	0.895	28%	40%
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	16,741,087,500	33,129,355,085	94,904,132,720	72,823,618,642	46,469,985,500	13,302,147,800	28,239,481,638	77,687,135,821	50,503,792,883	32,257,850,518	0.795	0.852	0.819	0.694	0.694	56%	54%
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	6,633,710,400	8,338,150,000	7,988,150,000	2,380,913,096	1,734,227,848	6,010,913,450	7,702,229,500	3,926,285,190	1,325,164,645	1,186,041,500	0.906	0.924	0.492	0.557	0.684	-19%	-24%

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan, Pelayanan Perangkat Daerah**

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Kota Bandung yang mana membutuhkan peningkatan pelayanan khususnya di bidang transportasi maka hal ini merupakan suatu tantangan dan sekaligus suatu peluang dalam pengembangan pelayanan transportasi baik bagi Dinas Perhubungan Kota Bandung maupun bagi stake holder lainnya.

Tantangan yang paling menonjol adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi, baik untuk jarak dekat, menengah maupun jarak jauh. Untuk kebutuhan transportasi jarak dekat peluang ini sudah ditangkap dengan maraknya angkutan rakyat berupa sepeda motor ojek maupun becak. Untuk jarak menengah (dalam kota) nampaknya hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Perhubungan Kota Bandung mengingat banyaknya penumpang angkutan kota yang beralih menggunakan sepeda motor sehingga sedikit banyak mempengaruhi kelangsungan usaha jarak menengah ini. Sedangkan untuk pelayanan angkutan jarak jauh nampaknya ada pergeseran pemilihan moda angkutan khususnya untuk kelas menengah ke atas (kelas angkutan umum eksekutif) dari angkutan massal (bus dan kereta api) beralih kepada kendaraan yang lebih kecil (travel).

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam menangani masalah transportasi ini cukup terbuka, khususnya untuk angkutan jarak menengah (dalam kota). Hal ini dimungkinkan dengan strategi Dinas Perhubungan Kota Bandung yang mencoba mengembangkan sarana angkutan umum massal (SAUM).

## **BAB III**

# **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Salah satu kriteria suatu kota dikatakan sebagai kota modern adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai bagi warga kota. Fungsi dan peran serta masalah yang ditimbulkan oleh sarana transportasi ini semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan penduduk.

Transportasi semakin vital peranannya sejalan dengan kemajuan ekonomi dan mobilitas masyarakatnya. Hal-hal yang bersangkutan paut dengan transportasi menyinggung langsung kepada kebutuhan pribadi – pribadi warga kota dan berkaitan langsung dengan ekonomi kota.

Sebagai ibukota dari Provinsi Jawa Barat Kota Bandung mengemban berbagai fungsi sebagai pusat dari berbagai kegiatan seperti pusat pemerintahan, pariwisata, perdagangan dan pendidikan, hal ini sedikit banyak berpengaruh kepada pelayanan sistem transportasi di Kota Bandung.

Adapun permasalahan transportasi secara umum di Kota Bandung adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah penduduk Kota Bandung yang cukup tinggi yaitu sekitar + 2,4 Juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 3% menyebabkan kebutuhan akan transportasi yang cukup tinggi, adapun faktor yang

mempengaruhi adalah daya tarik kota Bandung yang mendorong orang untuk berkunjung ataupun menetap di Kota Bandung.

- 2) Kemacetan lalu lintas di Kota Bandung sehingga mengakibatkan kemacetan pada pusat kota terutama menjelang hari libur (Jum'at, Sabtu, Minggu), adapun pada hari kerja faktor yang mendorong karena kecenderungan pergerakan kendaraan dari daerah pinggiran dan perbatasan Kota menuju ke daerah perkantoran, sentra usaha/bisnis, sekolah dan sebagainya. Adapun pada hari libur faktor yang mendorong banyaknya pendatang dari luar kota khususnya Jakarta yang mengisi akhir pekannya di sentra-sentra wisata belanja.
- 3) Pencemaran lingkungan (polusi udara) yang diakibatkan oleh sektor industri dan kendaraan bermotor (motorized traffic) seperti angkutan kota, bus, truk, kendaraan pribadi dan sepeda motor, adapun faktor yang mempengaruhi karena banyaknya volume kendaraan yang beroperasi di jalan.
- 4) Kecelakaan lalu lintas, adapun faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor kedisiplinan pengemudi, kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan yang rusak dan sebagainya.
- 5) Rendahnya kinerja (kualitas dan kuantitas) pelayanan angkutan umum, adapun faktor yang mempengaruhinya karena tingkat pengetahuan dan disiplin operator angkutan yang rendah.
- 6) Kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di Kota Bandung seperti marka, rambu, RPPJ dan paku jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya karena keterbatasan anggaran

yang dimiliki dan maraknya aksi pencurian dan perusakan/vandalism.

- 7) Rendahnya tingkat disiplin pengguna jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah mental dari pengguna jalan tersebut dan lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas.
- 8) Tidak seimbang pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan di Kota Bandung, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah kemudahan konsumen dalam memiliki kendaraan (fasilitas kredit) sementara Pemerintah Daerah kesulitan dalam pembebasan lahan untuk menambah ruas jalan yang baru.
- 9) Besarnya tingkat penggunaan kendaraan pribadi, faktor yang mempengaruhinya adalah banyaknya pengguna transportasi umum yang beralih ke kendaraan pribadi sementara angkutan umum dinilai tidak cukup nyaman.
- 10) Jaringan jalan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan pola distribusi angkutan barang, faktor yang mempengaruhinya adalah belum adanya terminal angkutan barang khusus yang akan menjadi sentra distribusi barang.
- 11) Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi secara menyeluruh, adapun faktor yang mempengaruhi karena penanggulangan masalah transportasi belum menjadi top priority bagi pemangku kebijakan.
- 12) Belum mantapnya manajemen kepengusahaan angkutan kota, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah masih banyaknya pribadi/orang per orang yang mengelola usaha angkutan kota yang dilakukan secara tradisional.
- 13) Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya, adapun faktor yang mempengaruhi

adalah keterbatasan lahan parkir yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (sekolah, kantor, tempat usaha dan sebagainya).

Perubahan berbagai paradigma tersebut diatas sangat berpengaruh kepada kebijakan, strategi dan kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dalam skala regional isu demokratisasi, hak azasi manusia dan lingkungan hidup yang lahir dan tumbuh berkembang di era reformasi perlu diantisipasi oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam pemberian pelayanan umum yang semakin mempertimbangkan azas keadilan, penyediaan fasilitas pelayanan umum yang memadai, penyediaan prasarana dan sarana transportasi serta penyusunan peraturan perundangan (PERDA dan PERWAL) yang berkaitan dengan kebijakan publik.

Keberanian masyarakat untuk melakukan protes terbuka terhadap kebijakan publik yang mereka anggap kurang memenuhi azas keadilan, menuntut adanya transparansi dalam proses pelayanan dan sosialisasi produk kebijakan publik yang akan diterapkan dalam skala regional, sehingga kebijakan tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga Dinas Perhubungan Kota Bandung perlu mengantisipasi berdasarkan pelaksanaan fungsi hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga. Namun demikian Dinas Perhubungan Kota Bandung senantiasa menerima semua kritikan dan masukan yang akan berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan di bidang transportasi.

Demikian pula isu perdagangan bebas yang bercirikan efisiensi dan privatisasi perlu diantisipasi berkenan dengan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai pelaksana sebagian kewenangan Pemerintah Kota Bandung di Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan

sebagai Regulator serta fasilitator dalam penyiapan kebijakan umum dan kebijakan teknis yang mencakup transportasi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk itu Dinas Perhubungan Kota Bandung perlu mengantisipasi dengan mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung dan Peraturan Daerah mengenai Pungutan Daerah di Bidang Perhubungan yang berisi perencanaan, pembinaan, organisasi dan tata laksana di bidang transportasi.

Dengan melihat fenomena dan perubahan paradigma diatas, sangat disadari bahwa pengaruh global dan regional serta lokal merupakan landasan bagi terbentuknya lingkungan baru dimasa depan. Dalam kaitan ini profil masa depan yang merupakan refleksi dari berbagai tantangan dan perubahan sebagaimana yang dikemukakan diatas adalah:

- 1) Terjadinya keterkaitan, keterpaduan dan ketergantungan antara elemen pada semua bidang.
- 2) Kecenderungan terpolanya lingkungan kerja masa depan yang sekaligus menggambarkan pola antar kegiatan dengan layanan antar moda transportasi yang saling terintegrasi secara kesisteman. Lingkungan kerja masa depan yang terbentuk akibat kemajuan teknologi transportasi akan melahirkan



realitas baru, yaitu adanya nuansa keterhubungan global dan mobilitas global antar sub sistem kegiatan.

- 3) Dalam persaingan global yang semakin tajam akan diwarnai oleh kecanggihan teknologi transportasi sehingga sektor transportasi akan dihadapkan kepada tuntutan atas kecepatan, keandalan, efisiensi dan daya saing yang semakin tinggi.
- 4) Sektor transportasi dituntut semakin berperan dalam mendukung pergerakan dan mobilitas orang, barang dan jasa guna mendukung tumbuhnya ekonomi di kota Bandung serta sekaligus mempersempit kesenjangan antar daerah dengan senantiasa memperhatikan kesesuaian tata ruang dan kelestarian lingkungan.
- 5) Meningkatnya tuntutan konsumen atau pengguna jasa terhadap kualitas layanan jasa transportasi yang direfleksikan oleh terwujudnya :
  - a. Kondisi Persaingan yang sehat, efisien dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan jasa transportasi yang pada gilirannya dapat memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung.
  - b. Pemerataan manfaat persaingan atau kompetensi bagi pengguna jasa, penyelenggara serta pemerintah Kota Bandung kepada seluruh lapisan masyarakat.
  - c. Perlindungan terhadap kepentingan pengguna jasa transportasi, dalam hal kualitas pelayanan, tarif dan variasi pilihan jasa sesuai preferensinya.
  - d. Peraturan Daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan transportasi secara efektif.

Dengan memperhatikan dalam menyikapi kecenderungan kedepan yang dihadapi, baik oleh jajaran operator maupun pengguna

jasa tersebut, diperlukan peran aktif Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan transportasi dalam pengalokasian dan pendayagunaan secara efektif dan efisien.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi Kepala Daerah Kota Bandung yang diimplementasikan dalam Visi Kota Bandung yaitu “Terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis” ditindak lanjuti oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai salah satu bentuk dukungan di bidang transportasi sesuai TUPOKSI untuk ikut mensukseskan visi tersebut. Sesuai dengan tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Bandung yaitu “menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan” maka salah satu tugas Dinas Perhubungan kota Bandung yang terkait dengan visi Kota Bandung tersebut adalah ikut serta mewujudkan sistem transportasi Kota Bandung yang unggul dan nyaman guna membantu masyarakat untuk lebih sejahtera. Adapun fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandung terkait visi Kota Bandung tersebut yaitu “perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan juga penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang” diarahkan untuk terwujudnya kota Bandung yang unggul, nyaman di bidang transportasi dengan memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendukung terwujudnya Visi Kepala Daerah harus didukung dan misi yang baik dari Kepala Daerah, adapun misi Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan daya saing.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani
3. Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan.
4. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Untuk mencapai tujuan dari misi Kepala Daerah diatas, maka dituangkan kedalam Misi Kota Bandung yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani dan mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.” Keterkaitan Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam menunjang misi ini sesuai tugas pokok nya yaitu melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang perhubungan untuk menyediakan fasilitas infrastruktur transportasi kota yang nyaman dengan masa pakai yang panjang juga merata di wilayah kota Bandung dengan konsep maju secara teknologi, hijau dengan mengurangi polusi udara sebagai akibat dari emisi gas buang kendaraan bermotor sehingga ikut berperan dalam kesehatan manusia yang dilakukan secara seimbang dan berkelanjutan dan meningkatkan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Adapun fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandung yang terkait dengan misi tersebut yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perhubungan agar mobilitas

penduduk kota, aksesibilitas sarana dan prasarana jalan, manajemen kebutuhan lalu-lintas dan keselamatan berlalu-lintas meningkat.

Faktor-faktor yang mungkin menjadi penghambat bagi terwujudnya Visi dan misi Kota Bandung diantaranya :

- Tidak seimbangnya pertumbuhan kendaraan dibandingkan dengan pertumbuhan ruas jalan yang baru sehingga mempengaruhi upaya untuk menekan angka kemacetan.
- Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan masyarakat sehingga sulit untuk mendorong mereka kembali menggunakan sarana angkutan umum agar dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi di jalan.
- Tingkat kesadaran pengemudi angkutan umum masih rendah sehingga memberikan kontribusi dalam menambah kesemrawutan di jalan.
- Masih banyaknya aksi-aksi yang tidak terpuji yang dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat yang berakibat rusak/hilangnya fasilitas kelengkapan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas maupun traffic light sehingga berpengaruh terhadap keamanan dan kenyamanan di jalan.
- Peralatan software maupun hardware ATCS yang sudah tua sehingga memerlukan biaya perawatan yang tinggi yang berimbas pada kualitas layanan traffic light.

Adapun faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk mewujudkan visi misi Kota Bandung yaitu :

- Angkutan umum bagi sebagian masyarakat masih menjadi andalan dalam menggunakan jasa transportasi, sehingga hal

ini menjadi harapan untuk memajukan angkutan umum massal yang lebih intens lagi.

- Adanya bantuan dari Kementerian Perhubungan dalam pengadaan bus sehingga membantu kelancaran pengoperasian Trans Metro Bandung.
- Adanya bantuan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat untuk up grading ATCS sehingga ikut membantu pelayanan traffic light di Kota Bandung.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam dokumen perencanaannya mempunyai sasaran prioritas sebagai berikut :

1. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat;
2. Meningkatnya kecukupan dan keandalan penyediaan sarana dan prasarana transportasi darat untuk meningkatkan konektivitas dan kinerja layanan;
3. Pemenuhan kebutuhan jumlah, kesesuaian kompetensi, serta penyebaran SDM aparatur perhubungan darat agar mampu menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan dengan baik dan benar;
4. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat yang berkelanjutan;
5. Terwujudnya transportasi darat yang berkeadilan, yang menjangkau seluruh wilayah NKRI, terjangkau oleh semua golongan ekonomi dan sosial, terutama oleh kaum berkebutuhan khusus dan responsif gender;

6. Meningkatnya penggunaan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan di bidang transportasi darat;
7. Pengembangan transportasi darat yang adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana;
8. Meningkatnya ketersediaan regulasi di bidang Perhubungan Darat.

Adapun sasaran strategis/program Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yaitu :

1. Menguatnya konektivitas nasional melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas dan keterpaduan jaringan transportasi darat;
2. Meningkatnya keselamatan sektor transportasi darat;
3. Meningkatnya jumlah sarana transportasi darat yang memenuhi kriteria kinerja (SPM) yang ditetapkan;
4. Meningkatnya kualitas dan kinerja sdm di bidang perhubungan darat
5. Meningkatnya peran angkutan umum perkotaan;
6. Meningkatnya aplikasi skema manajemen transportasi perkotaan;
7. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan di lingkungan DITJEN Perhubungan Darat.

Ada beberapa point yang selaras dengan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung yaitu :

Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayanan transportasi darat; pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana transportasi darat yang menjangkau masyarakat di wilayah (Kota Bandung). Faktor yang bisa menjadi penghambat adalah tingkat kesadaran operator kendaraan (khususnya angkutan umum) akan

pentingnya keselamatan dan keamanan transportasi. Demikian pula dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi darat terkendala adanya penolakan dari sebagian pihak yang merasa “terusik” dengan keberadaan sarana dan prasarana transportasi yang akan dibangun/dikembangkan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung. Adapun yang menjadi faktor pendorong bagi upaya pencapaian tujuan/sasaran tersebut adalah adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah daerah aq Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan pemerintah Pusat cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam upaya bersama untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan berlalu lintas.

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam dokumen perencanaan mempunyai tujuan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi
2. Meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan jalan
3. Meningkatkan penyediaan prasarana transportasi di Jawa Barat
4. Meningkatkan ketersediaan perlengkapan jalan

Adapun sasarannya sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan moda transportasi umum
2. Meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan umum
3. Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi
4. Meningkatnya ketersediaan perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi

Point yang menjadi keselarasan dengan tugas yang akan diemban oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung, yaitu peningkatan pelayanan transportasi. Faktor yang mungkin akan jadi hambatan bagi pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung yaitu terbatasnya

SDM yang mempunyai keahlian di bidangnya sementara ada beberapa SDM yang akan memasuki masa pensiun ataupun mutasi ke instansi lain. Sementara untuk pelayanan angkutan masih ada hambatan dari faktor eksternal yang sifatnya non teknis karena kendala sosial dan kultural. Adapun faktor pendukung yang bisa membantu terlaksananya tugas yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung, yaitu adanya koodinasi yang cukup baik pada pelaksanaan menghadapi angkutan lebaran, natal dan tahun baru.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Ada beberapa point Rencana tata ruang wilayah Kota Bandung yang mana Dinas Perhubungan Kota Bandung terkait di dalamnya, yaitu :

- a. Pemantapan hirarki jaringan jalan arteri primer pada sistem jaringan jalan primer;
- b. Pemantapan hirarki jalan kolektor primer pada sistem jaringan jalan primer;
- c. Restrukturisasi hirarki jalan pada sistem jaringan sekunder;
- d. Pembangunan jalan tol;
- e. Pembangunan jalan layang;
- f. Pengembangan terminal terpadu dan terminal kota;
- g. Penerapan manajemen kebutuhan transportasi;
- h. Pengembangan angkutan umum;
- i. Pembangunan jalur sepeda dan fasilitas pendukungnya; dan
- j. Pembangunan jalan baru dan jalan tembus.

Faktor yang bisa menjadi penghambat dari beberapa point di atas diantaranya adalah keterbatasan lahan yang dimiliki oleh Pemerintah



Kota Bandung, sementara untuk penyediaan lahan yang menggunakan dana APBD merupakan tupoksi instansi lain di luar Dinas Perhubungan Kota Bandung. Adapun faktor pendorong yang bisa membantu tugas Dinas Perhubungan kota Bandung diantaranya : adanya kerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/BAPPENAS dalam penyediaan kajian studi pra FS untuk pembangunan Terminal Terpadu di Gede Bage; adanya payung hukum yang menjadi landasan untuk kebijakan pengenaan tarif berkenaan dengan pelayanan perhubungan di Kota Bandung.

Untuk kajian lingkungan hidup strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung telah turut aktif dalam upaya menurunkan emisi gas buang dengan melakukan beberapa kali sosialisasi dan uji petik emisi gas buang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung maupun bengkel-bengkel tertunjuk dan instansi terkait lainnya.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

- Peningkatan mobilitas penduduk kota
- Peningkatan aksesibilitas sarana dan prasarana jalan
- Peningkatan manajemen kebutuhan lalu-lintas
- Peningkatan keselamatan berlalu-lintas

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan ditetapkan guna menjabarkan atau implementasi dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Maksud ditetapkannya tujuan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Bandung ditetapkan tujuan yang ingin dicapai antara lain:

1. Terciptanya kondisi lalu lintas yang terkendal;
2. Tersedianya sarana angkutan umum yang aman;
3. Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai;
4. Aparat Dinas Perhubungan Kota Bandung semakin handal.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari tujuan pencapaian misi Dinas Perhubungan Kota Bandung yaitu:

1. Terkendalinya kemacetan lalu lintas;
2. Terwujudnya sarana angkutan umum yang aman;
3. Perpindahan penggunaan moda angkutan;
4. Kapasitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung semakin baik.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Bandung dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini:

*Tabel 6 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas  
Perhubungan Kota Bandung*

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
1	Terciptanya kondisi lalu lintas yang terkendal		Peningkatan penanganan titik kemacetan	25%	50%	75%	88%	100%
		Terkendalinya kemacetan lalu lintas	Titik kemacetan yang teratasi	2	2	2	1	1
2	Tersedianya sarana angkutan umum yang aman		Peningkatan kondisi angkutan umum yang laik jalan	0.21%	0.46%	0.71%	0.96%	1.21%
		Terwujudnya sarana angkutan umum yang aman	Persentase angkutan umum yang laik jalan	90.00%	90.25%	90.50%	90.75%	91.00%
3	Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai		Peningkatan penggunaan sarana angkutan umum massal	0.50%	0.75%	1.00%	1.25%	1.50%
		Perpindahan penggunaan moda angkutan	Rasio Pengguna kendaraan pribadi dan pengguna angkutan umum	80:20	79,75 : 20,25	79,5 : 20,5	79,25 : 20,75	79:21
4	Aparat Dinas Perhubungan Kota Bandung semakin handal		Peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur Dinas Perhubungan kota Bandung	1	2	3	4	5
		Kapasitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung semakin baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	77	78	79	80

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi**

Strategi adalah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan, kebijakan dan aksi utama dalam hubungan yang kohesif. Suatu strategi yang baik akan membantu organisasi dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dalam bentuk *unique* berbasis kompetensi internal serta kemampuan mengantisipasi lingkungan. Beberapa strategi yang merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program, antara lain:

1. Meningkatkan penanganan simpang tertib lalu lintas dengan melengkapi fasilitas rambu lalu lintas, marka jalan dan parkir, pagar pengaman, paku jalan, cermin tikungan, *warning light*, meningkatkan koordinasi pengaturan lalu lintas dengan kepolisian, kampanye keselamatan jalan, dan pengendalian disiplin;
2. Mewujudkan sarana angkutan umum yang selamat dengan melakukan uji petik kendaraan, pengujian kendaraan, pemeliharaan prasarana balai pengujian dan alat pengujian kendaraan;
3. Meningkatkan perpindahan moda angkutan dari kendaraan pribadi ke kendaraan/angkutan umum melalui peningkatan pelayanan angkutan berupa penciptaan keamanan, kenyamanan dan kebersihan lingkungan terminal, pengoperasian angkutan massal dan bus sekolah, penyediaan sistem bike sharing, serta edukasi transportasi ramah lingkungan terhadap masyarakat;

4. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui Pendidikan dan pelatihan formal.

## **5.2 Kebijakan**

Pembangunan infrastruktur merupakan prioritas nasional dari Presiden sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam pengembangan transportasi dalam kurun waktu 2015-2020 yaitu mengupayakan tersedianya infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan, guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal, pedalaman maupun perbatasan. Hal ini mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan jasa transportasi merupakan bagian integral dari sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keterkaitan ini dapat dijelaskan secara rinci bahwa usaha jasa perhubungan sebagai bagian integral dari kegiatan perekonomian bangsa, mengemban fungsi aksesibilitas ke seluruh wilayah tanah air sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Mewujudkan Visi Kota Bandung yaitu “Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis”, Dinas Perhubungan Kota Bandung menetapkan tujuan yang mendukung terwujudnya Misi Ke-IV yaitu “Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang pembangunan infrastruktur serta pengendalian ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan”

melalui sasaran peningkatan infrastruktur kota terpadu dan berkualitas dengan strategi yang terinci pada tabel berikut:

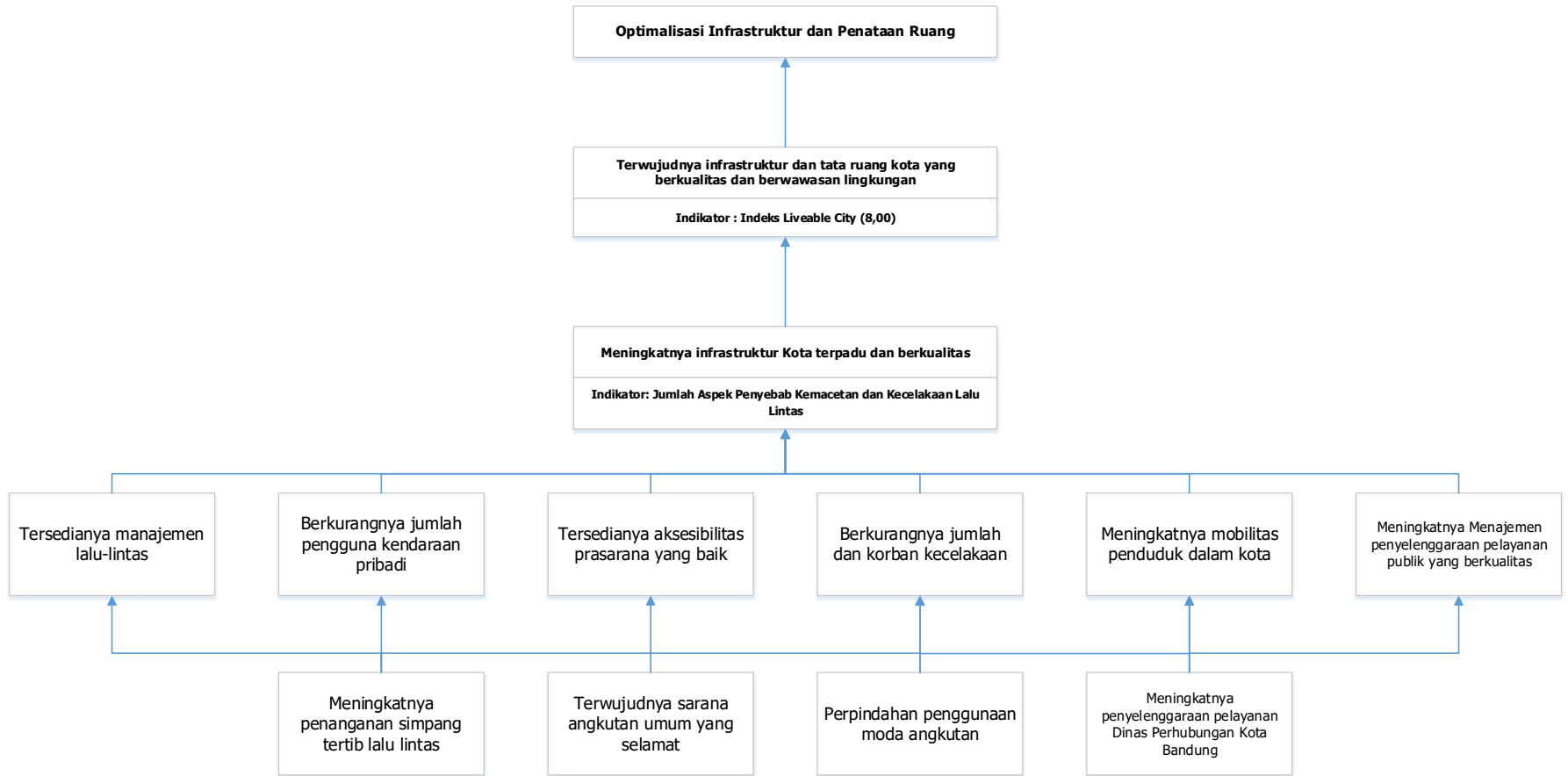
(table T-C.26).

Tabel 7 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<b>VISI : Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis</b>			
<b>MISI IV : Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang pembangunan infrastruktur serta pengendalian ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>Terwujudnya Infrastruktur dan Tata Ruang Kota yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan</b>	Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	Meningkatkan ketertiban lalu lintas	Meningkatkan penanganan simpang tertib lalu lintas
		Meningkatkan perpindahan moda angkutan	Meningkatkan penggunaan kendaraan umum
		Meningkatkan sarana angkutan umum	Meningkatkan kualitas angkutan umum yang laik jalan
<b>MISI II : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih</b>			
<b>Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisein</b>	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatkan Penyelenggaraan pelayanan	Meningkatkan kualitas SDM penyelenggara pelayanan dan meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan

### 5.3 Analisis Strategi

#### Kerangka Logis





## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan PD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab PD. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Bagian ini merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program prioritas. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya.

Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun/periode atau sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya. Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan *urgent* untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala PD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategik, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah

secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan). Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikasi rencana program prioritas PD berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan PD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi PD dalam penyusunan RENSTRA PD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing urusan wajib/pilihan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kota Bandung, APBD Propinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat secara khusus diatur dalam Pasal 176 ayat 2, PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017, Sumber pendanaan APBD, termasuk didalamnya dengan mendorong partisipasi masyarakat serta kontribusi sektor swasta dan pihak lain dalam pembangunan serta sumber pendanaan lain yang sah.

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

(table T-C.27).

Tabel 8 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kota Bandung

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out come) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian per tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Persentase kinerja pelayanan transportasi yang handal	n/a	20%		40%		60%		80%		100%		100%			
Perentase Simpang tertib lalu lintas yang tertangani		20%		0	11,895,848,920	0	12,209,285,696	0	12,522,722,472	0	12,836,159,248				
<b>Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang terbangun</b>		<b>20%</b>	<b>12,299,662,708</b>	<b>40%</b>	<b>11,895,848,919</b>	<b>60%</b>	<b>12,209,285,696</b>	<b>80%</b>	<b>12,522,722,471</b>	<b>100%</b>	<b>12,836,159,247</b>	<b>100%</b>	<b>61,763,679,042</b>	<b>SPT</b>	
Tersedianya Rambu Rambu Lalu Lintas		850 buah	2,487,608,961	729 buah	2,323,481,470	746 buah	2,585,909,267	763 buah	2,749,235,689	780 buah	2,963,011,957	3868 buah	13,109,247,344	Seksi Perengkapan jalan	
Tersedianya marka jalan		70.000 m2	7,400,240,834	60.000 m2	7,400,240,834	61.450 m2	7,400,240,834	62.800 m2	7,500,000,000	64.200 m2	7,550,000,000	318.450 m2	37,250,722,502	Seksi Perengkapan jalan	
Pagar pengaman jalan yang terpasang		100 unit	846,741,240	86 unit	762,591,980	88 unit	780,500,254	90 unit	798,177,589	92 unit	815,612,441	456 buah	4,003,623,503	Seksi Perengkapan jalan	
Tersedianya Paku Jalan		1.500 buah	486,852,450	1.287 buah	438,468,987	1.317 buah	448,765,742	1.347 buah	458,929,714	1.376 buah	468,954,264	6.827 buah	2,301,971,157	Seksi Perengkapan jalan	
Jumlah cermin tikungan yang terpasang		60 buah	383,659,223	51 buah	345,531,117	53 buah	353,645,372	54 buah	361,654,989	55 buah	369,554,736	273 buah	1,814,045,437	Seksi Perengkapan jalan	
Jumlah Lampu Peringatan Warning light yang terpasang		20 unit	694,560,000	17 unit	625,534,532	18 unit	640,224,227	18 unit	654,724,490	18 unit	669,025,849	91 buah	3,284,069,099	Seksi Perengkapan jalan	
				0	16,900,742,322	0	17,346,050,111	0	17,791,357,901	0	18,236,665,690				
<b>Persentase simpang tertib lalu lintas</b>		<b>20%</b>	<b>17,474,451,086</b>	<b>40%</b>	<b>16,900,742,322</b>	<b>60%</b>	<b>17,346,050,111</b>	<b>80%</b>	<b>17,791,357,901</b>	<b>100%</b>	<b>18,236,665,690</b>	<b>100%</b>	<b>87,749,267,110</b>	<b>PdKT</b>	
Laporan koordinasi		2 laporan	2,000,000,000	2 laporan	1,801,239,726	2 laporan	1,900,000,000	2 laporan	2,000,000,000	2 laporan	2,100,000,000	10 laporan	9,801,239,726	PdKT	
Laporan pengaturan lalu lintas		12 laporan	10,971,015,564	12 laporan	10,971,015,564	12 laporan	11,121,050,111	12 laporan	11,291,357,901	12 laporan	11,386,665,690	60 laporan	55,741,104,830	PdKT	
Jumlah Kampanye publik		4 kali	500,000,000	4 kali	450,309,932	4 kali	475,000,000	4 kali	500,000,000	4 kali	550,000,000	16 kali	2,475,309,932	PdKT	
Jumlah penertiban angkutan dijalan raya		240 kali	4,003,435,522	240 kali	3,678,177,100	240 kali	3,850,000,000	240 kali	4,000,000,000	240 kali	4,200,000,000	1200 kali	19,731,612,622	PdKT	
<b>Persentase kinerja APILL dan parkir</b>		<b>70%</b>	<b>19,115,017,169</b>	<b>72.50%</b>	<b>17,215,364,145</b>	<b>75%</b>	<b>17,619,639,911</b>	<b>77.50%</b>	<b>18,018,702,303</b>	<b>80%</b>	<b>18,412,290,654</b>	<b>80%</b>	<b>90,381,014,181</b>	<b>MTP</b>	
ATCS yang dipelihara	137 titik	137 titik	10,000,054,374	137 titik	9,006,247,601	137 titik	9,217,745,169	137 titik	9,426,515,351	137 titik	9,632,421,779	137 titik	47,282,984,274	Seksi Manajemen Transportasi	
Perlengkapan juru parkir		1.774 stel	1,499,999,962	1.774 stel	1,350,929,760	1.774 stel	1,382,654,222	1.774 stel	1,413,969,579	1.774 stel	1,444,855,374	1.774 stel	7,092,408,897	Seksi Manajemen Parkir	
Jumlah marka parkir yang tersedia		2.800 m'	108,935,813	2.400 m'	98,109,757	2.450 m'	100,413,710	2.500 m'	102,687,953	2.560 m'	104,930,999	12.710 m'	515,078,233	Seksi Manajemen Parkir	
Jumlah mesin parkir yang beroperasi		443 unit	7,506,027,020	443 unit	6,760,077,027	443 unit	6,918,826,809	443 unit	7,075,529,420	443 unit	7,230,082,501	443 unit	35,490,542,778	UPT Parkir	
<b>Persentase angkutan umum yang laik jalan</b>		<b>0</b>	<b>7,069,949,068</b>	<b>0</b>	<b>6,837,833,523</b>	<b>0</b>	<b>7,017,999,605</b>	<b>0</b>	<b>7,198,165,687</b>	<b>0</b>	<b>7,378,331,769</b>	<b>21.72%</b>			
<b>Persentase jumlah kendaraan angkutan umum yg lulus uji KIR</b>		<b>90.20%</b>	<b>7,069,949,068</b>	<b>90.40%</b>	<b>6,837,833,522</b>	<b>90.60%</b>	<b>7,017,999,604</b>	<b>90.80%</b>	<b>7,198,165,687</b>	<b>91.00%</b>	<b>7,378,331,769</b>	<b>21.72%</b>	<b>35,502,279,651</b>	<b>PPT</b>	
Uji petik kendaraan bermotor	6 kali per tahun	6 kali	176,994,750	6 kali	159,404,988	6 kali	163,148,363	6 kali	166,843,466	6 kali	170,487,881	36 kali	836,879,448		
Bukti tanda uji yang tersedia		3 set	4,047,211,065	3 set	4,047,211,065	3 set	4,100,000,000	3 set	4,150,000,000	3 set	4,200,000,000	15 set	20,544,422,130		
Prasarana balai pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara		1 unit	382,195,826	1 unit	412,497,723	1 unit	484,028,349	1 unit	559,068,084	1 unit	609,068,084	1 unit	2,446,858,068	Seksi Kelalkan & Keselamatan Transportasi	
Prasarana pengujian kendaraan bermotor yang terbangun		1 unit	1,586,829,670	1 unit	1,429,130,320	1 unit	1,462,691,199	1 unit	1,495,819,291	1 unit	1,528,492,956	5 unit	7,502,963,437		
Sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara		1 set	876,717,757	1 set	789,589,426	1 set	808,131,693	1 set	826,434,846	1 set	870,282,847	1 set	4,171,156,569		
<b>Persentase penggunaan moda angkutan</b>	26%	27%		0	29,702,727,842	0	30,485,347,672	0	31,267,967,501	0	32,050,587,331				
<b>Persentase penumpang sarana angkutan umum</b>		<b>20%</b>	<b>30,711,009,902</b>	<b>20.25%</b>	<b>29,702,727,842</b>	<b>20.50%</b>	<b>30,485,347,672</b>	<b>20.75%</b>	<b>31,267,967,501</b>	<b>21.00%</b>	<b>32,050,587,330</b>	<b>21.00%</b>	<b>154,217,640,247</b>	<b>MTP</b>	

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out come) dan Kegiatan (Out put)	Data Capaian per tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp		
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(17)	(18)		
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Jumlah tenaga keamanan di lingkungan terminal		12	514,861,028	12	514,861,028	12	514,861,028	12	550,000,000	12	575,000,000		2,669,583,084	UPT Terminal	
Jumlah tenaga kebersihan di lingkungan terminal		55	2,318,846,220	55	2,318,846,220	55	2,318,846,220	55	2,400,000,000	55	2,500,000,000		11,856,538,660	UPT Terminal	
Laporan hasil koordinasi		4	556,604,840	4	501,289,375	4	513,061,368	4	524,681,554	4	536,142,343		2,631,779,480	Kasie Manajemen Angkutan	
Jumlah koridor bus TMB yang beroperasi		4	17,674,031,660	4	17,674,031,660	4	18,000,000,000	4	18,250,000,000	4	18,500,000,000		90,098,063,320	UPT Angkutan	
Jumlah station bike sharing yang beroperasi		30	2,998,325,760	30	2,045,359,165	30	2,200,000,000	30	2,350,000,000	30	2,539,444,987		12,133,129,912	UPT Angkutan	
Jumlah koridor bus sekolah yang beroperasi		4	6,648,340,394	4	6,648,340,394	4	6,938,579,056	4	7,193,285,947	4	7,400,000,000		34,828,545,791	UPT Angkutan	
				0	13,756,594,980	0	14,119,059,467	0	14,481,523,955	0	14,843,988,442				
<b>Persentase sarana prasarana perhubungan yang terbangun</b>		<b>20%</b>	<b>14,223,573,232</b>	<b>40%</b>	<b>13,756,594,980</b>	<b>60%</b>	<b>14,119,059,467</b>	<b>80%</b>	<b>14,481,523,955</b>	<b>100%</b>	<b>14,843,988,442</b>	<b>100%</b>	<b>71,424,740,076</b>	<b>SPT</b>	
Sarana bike sharing yang terbangun		1	884,641,200	1	796,725,436	1	815,435,281	1	833,903,851	1	852,119,083		4,182,824,851	Kasie Prasarana	
Sarana angkutan umum / khusus yang tersedia		3	2,340,570,425	3	2,500,000,000	3	2,550,000,000	3	2,600,000,000	3	2,650,000,000		12,640,570,425	Kasie Sarana Transportasi	
Jembatan penyeberangan orang yang dibangun		1	1,422,408,913	1	1,564,649,804	1	1,721,114,785	1	1,893,226,263	1	2,082,548,890		8,683,948,655	Kasie Prasarana	
Terminal yang direhabilitasi/pemeliharaan		1	4,499,997,791	1	4,323,713,930	1	4,353,648,964	1	4,353,648,964	1	4,353,648,964		21,884,658,613	Kasie Prasarana	
Jumlah shelter angkutan dan shelter sepeda yang terpelihara		5	1,345,857,003	5	1,212,105,550	5	1,240,569,943	5	1,268,667,272	5	1,296,379,182		6,363,578,949	Kasie Prasarana	
Terbangunnya signage angkot stop		14	684,405,071	14	616,388,801	14	630,863,723	14	645,151,983	14	675,568,481		3,252,378,060	Kasie Sarana Transportasi	
Sarana Prasarana terminal yang meningkat		1	655,954,459	1	590,765,615	1	604,638,817	1	634,247,328	1	631,839,566		3,117,445,785	Kasie Prasarana	
Sarana prasarana BTS yang terbangun		1	1,998,492,870	1	1,799,882,375	1	1,842,149,783	1	1,883,872,128	1	1,925,022,158		9,449,419,314	Kasie Prasarana	
prasarana angkutan umum / khusus yang terbangun		1	391,245,500	1	352,363,469	1	360,638,171	1	368,806,166	1	376,862,119		1,849,915,424	Kasie Prasarana	
		0	5,197,250,094	0	5,026,617,671	0	5,159,061,085	0	5,291,504,498	0	5,423,947,911				
<b>Persentase dokumen perencanaan</b>		<b>100%</b>	<b>5,197,250,094</b>	<b>100%</b>	<b>5,026,617,671</b>	<b>100%</b>	<b>5,159,061,085</b>	<b>100%</b>	<b>5,291,504,498</b>	<b>100%</b>	<b>5,423,947,911</b>	<b>100%</b>	<b>26,098,381,259</b>	<b>PPT</b>	
Dokumen perencanaan		10	1,960,193,400	10	1,960,193,400	10	1,975,000,000	10	2,000,000,000	10	2,000,000,000		9,895,386,800	Seksi Perencanaan	
Dokumen perencanaan		9	2,408,373,344	9	2,237,740,921	9	2,334,061,085	9	2,431,504,498	9	2,548,947,911		11,960,627,759	Seksi Perencanaan	
Laporan kinerja transportasi		10	828,683,350	10	828,683,350	10	850,000,000	10	860,000,000	10	875,000,000		4,242,366,700	Seksi Perencanaan	
		0	1,000,000,000	0	967,168,710	0	992,652,074	0	1,018,135,437	0	1,043,618,801				
<b>Persentase pengguna transportasi ramah lingkungan</b>	<b>(0)</b>	<b>1%</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>1.25%</b>	<b>967,168,710</b>	<b>1.50%</b>	<b>992,652,074</b>	<b>1.75%</b>	<b>1,018,135,437</b>	<b>2.00%</b>	<b>1,043,618,801</b>	<b>2%</b>	<b>5,021,575,022</b>	<b>PPT</b>	
Edukasi eco transport		6	500,000,000	6	483,584,355	6	496,326,037	6	509,067,718	6	521,809,400		2,510,787,510	Seksi Bina Transportasi	
Kampanye publik		6	500,000,000	6	483,584,355	6	496,326,037	6	509,067,718	6	521,809,401		2,510,787,512	Seksi Bina Transportasi	
<b>Cakupan Pelayanan Transportasi</b>		<b>100%</b>	<b>5,511,500,000</b>	<b>100%</b>	<b>13,668,403,371</b>	<b>100%</b>	<b>14,351,823,540</b>	<b>100%</b>	<b>15,069,414,717</b>	<b>100%</b>	<b>15,822,885,452</b>	<b>100%</b>	<b>64,424,027,079</b>	<b>BLUD</b>	
Pelayanan angkutan		1	5,511,500,000	1	5,787,075,000	1	6,076,428,750	1	6,380,250,188	1	6,699,262,697		30,454,516,634	BLUD Angkutan	
Pelayanan parkir		1		1	7,881,328,371	1	8,275,394,790	1	8,689,164,529	1	9,123,622,755		33,969,510,445	BLUD Parkir	
<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>		<b>76</b>		<b>77</b>		<b>78</b>		<b>79</b>		<b>80</b>		<b>80</b>			
<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>100%</b>	<b>8,497,395,497</b>	<b>100%</b>	<b>8,218,415,045</b>	<b>100%</b>	<b>8,434,957,263</b>	<b>100%</b>	<b>8,651,499,482</b>	<b>100%</b>	<b>8,868,041,700</b>	<b>100%</b>	<b>34,172,913,490</b>	<b>SEKRETARIAT</b>	
Laporan pelayanan surat menyurat		12	129,594,000	12	116,714,931	12	120,000,000	12	120,965,504	12	125,111,942	60 laporan	612,386,377	Kasubag Umpeg	
Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik		12	2,315,718,320	12	2,315,718,320	12	2,400,000,000	12	2,450,000,000	12	2,500,000,000	60 laporan	11,981,436,640	Kasubag Umpeg	
Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		12	1,139,640,500	12	1,139,640,500	12	1,150,000,000	12	1,200,000,000	12	1,250,000,000	60 laporan	5,879,281,000	Kasubag Umpeg	
Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK		12	199,445,717	12	179,624,774	12	185,000,000	12	188,006,789	12	192,113,482	60 laporan	944,190,763	Kasubag Umpeg	
Jumlah Jenis Pengadaan Cetakam Dan Pengadaan		4	986,316,760	4	800,000,000	4	800,000,000	4	800,000,000	4	800,000,000	4 jenis	4,186,316,760	Kasubag Umpeg	
Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan		12	159,000,000	12	143,198,558	12	150,000,000	12	149,880,779	12	153,154,674	60 laporan	755,234,011	Kasubag Umpeg	
Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan		12	250,000,000	12	225,154,966	12	229,957,263	12	235,661,602	12	235,661,602	60 laporan	1,176,435,434	Kasubag Umpeg	

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out come) dan Kegiatan (Out put)	Data Capaian per tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp			
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Dari Peraturan Perundang-Undangan																
Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman		12	750,000,000	12	680,682,795	12	700,000,000	12	706,984,807	12	712,000,000	60 laporan	3,549,667,602	Kasubag Umpeg		
Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah		12	950,000,000	12	1,000,000,000	12	1,050,000,000	12	1,100,000,000	12	1,150,000,000	60 laporan	5,250,000,000	Kasubag Umpeg		
Laporan penyediaan jasa pengamanan kantor		12	1,617,680,200	12	1,617,680,200	12	1,650,000,000	12	1,700,000,000	12	1,750,000,000	60 laporan	8,335,360,400	Kasubag Umpeg		
<b>Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>8,339,916,492</b>	<b>100%</b>	<b>8,066,106,279</b>	<b>100%</b>	<b>8,278,635,402</b>	<b>100%</b>	<b>8,491,164,526</b>	<b>100%</b>	<b>8,703,693,649</b>	<b>100%</b>	<b>33,539,599,856</b>	<b>SEKRETARIAT</b>		
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Tersedianya Mebeulair Dinas		11	519,879,492	11	468,213,797	11	500,000,000	11	500,000,000	11	500,767,131	55 unit	2,488,860,420	Kasubag Umpeg		
Tersedianya Peralatan Kerja Aparatur		1	499,584,322	1	449,935,564	1	475,000,000	1	470,931,367	1	481,218,074	5 set	2,376,669,327	Kasubag Umpeg		
Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		1	2,370,448,757	1	2,317,209,062	1	2,350,000,000	1	2,350,000,000	1	2,400,000,000	5 set	11,787,657,819	Kasubag Umpeg		
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara		1	800,000,000	1	720,495,890	1	750,000,000	1	754,117,128	1	770,589,552	5 laporan	3,795,202,570	Kasubag Umpeg		
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara		144	3,750,004,921	155	3,750,004,921	166	3,834,928,522	177	4,039,058,410	188	4,165,825,079	188 unit	19,539,821,853	Kasubag Umpeg		
Jumlah Gedung Kantor yang memadai		1	399,999,000	1	360,247,045	1	368,706,880	1	377,057,621	1	385,293,813		1,891,304,359	Kasubag Umpeg		
<b>Tingkat kepatuhan Pegawai Negeri Sipil</b>		<b>100%</b>	<b>850,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>822,093,404</b>	<b>100%</b>	<b>843,754,263</b>	<b>100%</b>	<b>865,415,122</b>	<b>100%</b>	<b>887,075,981</b>	<b>100%</b>	<b>4,268,338,770</b>	<b>SEKRETARIAT</b>		
Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		447	600,000,000	447	596,938,438	447	600,000,000	447	615,415,122	447	627,075,981	2235 stel	3,039,429,541	Kasubag Umpeg		
Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu		154	250,000,000	154	225,154,966	154	243,754,263	154	250,000,000	154	260,000,000	770 stel	1,228,909,229	Kasubag Umpeg		
<b>Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya</b>		<b>16%</b>	<b>400,000,000</b>	<b>17%</b>	<b>386,867,484</b>	<b>18%</b>	<b>397,060,829</b>	<b>19%</b>	<b>407,254,174</b>	<b>20%</b>	<b>417,447,520</b>	<b>20%</b>	<b>2,008,630,007</b>	<b>SEKRETARIAT</b>		
Terdidiknya aparatur Dishub		50 orang	400,000,000	50 orang	386,867,484	50 orang	397,060,829	50 orang	407,254,174	50 orang	417,447,520	250 orang	2,008,630,007	Kasubag Umpeg		
<b>Tingkat pengelolaan data dan informasi Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>110,780,000</b>	<b>100%</b>	<b>107,142,950</b>	<b>100%</b>	<b>109,965,997</b>	<b>100%</b>	<b>112,789,044</b>	<b>100%</b>	<b>115,612,091</b>	<b>100%</b>	<b>556,290,082</b>	<b>SEKRETARIAT</b>		
Tersedianya data base terpadu sistem informasi Perangkat Daerah		1 dok	110,780,000	1 dok	107,142,950	1 dok	109,965,997	1 dok	112,789,044	1 dok	115,612,091	5 dokumen	556,290,082	Kasubag Program Datin		
			<b>130,800,717,733</b>		<b>126,506,361,490</b>		<b>129,839,603,729</b>		<b>133,172,845,968</b>		<b>136,506,088,207</b>					

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Berdasarkan matriks 5 (lima) tahun kedepan yang telah diuraikan dalam Bab VI, maka indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung yang mendukung sasaran RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023 dapat dilihat sesuai tabel di bawah ini.

(table T-C.28).

*Tabel 9 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD*

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>1</b>	Persentase Simpang tertib lalu lintas yang tertangani	0%	25%	50%	75%	88%	100%	100%
<b>2</b>	Persentase angkutan umum yang laik jalan	89.75%	90.00%	90.25%	90.50%	90.75%	91.00%	91.00%
<b>3</b>	Persentase penggunaan moda angkutan	0%	0.50%	0.75%	1.00%	1.25%	1.50%	1.50%
<b>4</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	76	77	78	79	80	80

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah khususnya di sektor transportasi serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Perhubungan bagi seluruh unit kerja dan stakeholder dilingkungan Pemerintah Kota Bandung. Dokumen Rencana Strategis ini menguraikan sasaran-sasaran yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan beserta target yang harus dicapai lima tahun yang akan datang, program-program, dan prediksi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Bandung secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung 2019-2024 dengan sebaik-baiknya.
2. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung dijabarkan kedalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandung (Renja) Tahun 2019 s/d 2024 dan menjadi acuan bagi Unit Kerja dilingkungan Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2019 sampai tahun 2024.
3. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 s/d 2024 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 s/d 2023 khususnya sektor perhubungan.

4. Dinas Perhubungan Kota Bandung berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis dengan Rencana Kerja unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Bandung.
5. Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung 2019-2024, masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Bandung berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dalam keterkaitannya dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandung (Renja) Tahun 2019 s/d 2024.